



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR: 180 / 22 / HUKUM / 2026

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 14 Januari 2026

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARO
 NOMOR : 180/22/Hukum/2026
 TANGGAL 14 Januari 2026
 TENTANG
 PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
 TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KARO

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

No	Judul Rancangan Peraturan Bupati	Pengusul	Materi Pokok	Status		Dasar Hukum Pelaksanaan
				Baru	Ubah	
1	2	3	4	5		6
1.	Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2026	Bappedalitbang	Penerapan Inovasi Instansi Pemerintah Daerah	√		Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022
2.	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya LOKAL (RADPGBPSDL) Kabupaten Karo Tahun 2025-2029	Bappedalitbang	Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal di Kabupaten Karo	√		1. Undang-undang No. 36/2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang No. 18/2012 tentang Pangan 3. Undang-undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan

						Pembangunan Nasional 4. Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
3.	Strategi Sanitasi Kabupaten Karo Tahun 2026-2030	Bappedalitbang	Kebijakan dan Strategi pembangunan sanitasi secara menyeluruh di Kabupaten Karo yang meliputi air limbah domestik dan persampahan	√		1. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum 3. Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
4.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2027	Bappedalitbang	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2027	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

						<p>Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)</p>
5.	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026	Bappedalitbang	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2027	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

					<p>Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)</p>
6.	Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2027	Bappedalitbang	Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2028	√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

					Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
7.	Penetapan Indikator dan Formula Kinerja Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025-2030	Bappedalitbang	Untuk menetapkan indikator kinerja pada RPJMD Kab. Karo tahun 2025-2029 dan Renstra	√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

			Perangkat Daerah Tahun 2025-2029		Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
8.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Bappedalitbang	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	√	1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang

						<p>Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,</p>
--	--	--	--	--	--	---

						Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
9.	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	Bappedalitbang	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	√		1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung

						<p>Perseroan Terbatas</p> <p>2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha</p>
10.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pentelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	Aturan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pentelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	√		Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
11.	Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo	Satpol PP	Aturan Petunjuk Teknis SOP dan Kode Etik Satpol PP Kab. Karo		√	Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
12.	Penyelenggaraan Program Jaminan Nasional Ketenagakerjaan bagi Pekerja/Pekerja Mandiri/Pekerja Rentan bukan Penerima Upah (BPU) pada Perkebunan Sawit di Kabupaten Karo	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja/Pekerja Mandiri/Pekerja Rentan	√		<p>1. Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>2. Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional</p>

						Sistem Jaminan Sosial Nasional 3. Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
13.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo	Bagian Organisasi Setda Kab. Karo	Peraturan tentang perubahan atas Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo		√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
14.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo	Bagian Organisasi Setda Kab. Karo	Peraturan tentang perubahan atas Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan		√	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
15.	Peraturan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo	Bagian Organisasi Setda Kab. Karo	Peraturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Karo		√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan

						Penanggulangan Bencana Daerah
16.	Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Karo	Bagian Organisasi Setda Kab. Karo	Peraturan tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Karo		√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17.	Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi Setda Kab. Karo	Peraturan tentang tata naskah dinas	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
18.	Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Bagian Organisasi Setda Kab. Karo	Peraturan tentang hari dan jam kerja pada Perangkat Daerah dan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	√		Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Perda Kab. Karo Nomor 01 Tahun 2024
19.	Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di	Bagian Organisasi Setda Kab. Karo	Peraturan tentang standar kompetensi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	√		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

	Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo					Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor SKJ.01 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana
20.	Peraturan Bupati Karo tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Rangka Perbaikan Hunian Tetap Relokasi Tahap III	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Rangka Perbaikan Hunian Tetap Relokasi Tahap III	√		1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
21.	Peraturan Bupati Karo tentang Rencana Rehabilitasi dan	BPBD	Peraturan Bupati Karo tentang Rencana Rehabilitasi dan	√		1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

	Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung Tahun 2026-2028		Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung Tahun 2026-2028		<p>Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)</p> <p>3. Undang-undnag Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>
--	---	--	---	--	---

						<p>2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)</p> <p>4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679)</p> <p>5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864)</p> <p>6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935)</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana</p> <p>14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana</p> <p>15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana</p> <p>16. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 03)</p> <p>17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08)</p>
22.	Kajian Risiko Bencana	BPBD	Kajian Risiko Bencana	√		1. Undang-undang Nomor 24 Tahun

						<p>2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)</p> <p>2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>Republik Indonesia Nomr 6178)</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541)</p> <p>5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang</p>
--	--	--	--	--	--	---

						Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03)	
23.	Rencana Bencana	Penanggulangan	BPBP	Rencana Bencana	Penanggulangan	√	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

						<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541)</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03)</p>
24.	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	BPBD	Rencana Penanggulan Kedaruratan Bencana	√		<p>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik</p>

						<p>Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)</p> <p>2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>101 Tahun 2018 tentang standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541)</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran DAERAH Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03)</p>
25.	Rencana Kontingensi	BPBD	Rencana Kontingensi	√		1. Undang-undang Nomor 24 Tahun

						<p>2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)</p> <p>2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>Republik Indonesia Nomr 6178)</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541)</p> <p>5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunana Rencana Kontingensi Bencana</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Karo</p>
--	--	--	--	--	--	---

						Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03)
26.	Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada Guru Sekolah Minggu dan Guru Mengaji di Kabupaten Karo	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda kab. Karo	Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada Guru Sekolah Minggu dan Guru Mengaji di Kabupaten Karo meliputi: 1. Kriteria penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan 2. Penetapan Calon Penerima Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan 3. Besaran Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan 4. Pendanaan 5. Evaluasi dan Pelaporan 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Ketentuan Sanksi	√		Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
27.	Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi dan/atau Pembangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Karo	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda kab. Karo	Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi dan/atau Pembangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Karo	√		Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama

						Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama
28.	Pemberian Bantuan untuk mendukung kemajuan kebudayaan di Kabupaten Karo	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda kab. Karo	Menetapkan besaran bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan kebudayaan, khususnya untuk kegiatan Pesta Tahunan di Kabupaten Karo	√		Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
29.	Pemberian Bantuan Beasiswa di Kabupaten Karo	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda kab. Karo	Pedoman Pemberian Beasiswa kepada siswa dan Mahasiswa berprestasi di Kabupaten Karo	√		Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
30.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	DPMPTSP	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis Usaha atau atau Kegiatan Penanaman Modal - Kriteria Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi - Bentuk Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi - Pemohon - Tim Verifikasi Dan Penilaian - Tata Cara Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi - Jangka Waktu - Pelaporan Dan Evaluasi 	√		Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

			<ul style="list-style-type: none"> - Sanksi Administratif - Pembiayaan - Ketentuan Penutup 			
31.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Karo	DPMPTSP	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan Perizinan Risiko Rendah - Integrasi dengan sistem OSS RBA - Penyederhanaan Prosedur 	√		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
32.	Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	BKPSDM	Pelaksanaan Mutasi PNS atas permintaan sendiri	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemendagri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi PNS Antar Kabupaten / Kota Antar Propinsi dan Antar Provinsi 2. Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
33.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	BKPSDM	Peningkatan kinerja, disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Karo melalui pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif		√	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun

						2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
34.	Modernisasi Agribisnis dan Pengendalian Terpadu Hama Lalat Buah pada Komoditi Jeruk di Kabupaten Karo	Dinas Pertanian	Modernisasi dan Pengendalian Hama Lalat Buah secara Terpadu	√		1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman
35.	Peninjauan Besaran Tarif Retribusi Pemotongan Hewan Ternak	Dinas Pertanian	Peninjauan Besaran Tarif Jasa Usaha atas Pemotongan Hewan Ternak di Rumah Potong Hewan (RPH)	√		Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
36.	Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan	Dinas Pertanian	Rencana Aksi Daerah untuk Mendukung Keberlanjutan Pertanaman Kelapa Sawit di Kabupaten Karo	√		Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2014-2019
37.	Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha	Dinas Pertanian	STD-B diperuntukkan bagi Perkebunan dengan Luas Kurang dari 25 (Dua Puluh Lima) Hektar	√		Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan

	Perkebunan untuk Budidaya (STD-B)					Nomor:283/KPTS/PI.400/9/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/KPTS/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B)
38.	Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo	RSUD	Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama BLUD RSUD Kabupaten Karo dengan mitra kerjsa sama dalam upaya meningkatkan pelayanan RSUD Kab. Karo	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
39.	Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo	RSUD	Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Non ASN pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Karo dalam upaya meningkatkan pelayanan RSUD Kab. Karo	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
40.	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo	RSUD	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Karo dalam upaya meningkatkan pelayanan RSUD Kab. Karo	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan

						Layanan Umum Daerah
41.	Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo	RSUD	Penyesuaian tarif dan komponen pada detail rincian objek Retribusi Jasa Umum pelayanan kesehatan BLUD RSUD Kab. Karo yang terdapat pada Peraturan Daerah Kab. Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	√		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Peraturan Daerah Kab. Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi penyesuaian tarif maupun komponen pada detail rincian objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Karo.
42.	Pusat Pembelajaran Keluarga	DP3AP2KB	Pengasuhan anak, ketahanan, dan kualitas keluarga, perlindungan anak, dan perempuan serta pemberdayaan		√	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

			keluarga dan layanan perempuan dan anak			<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
43.	Pencegahan dan Penanganan Pornografi	DP3AP2KB	Pencegahan dan Penanganan Pornografi di Kabupaten Karo	√		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak
44.	Rencana Aksi Daerah	DP3AP2KB	5 klaster hak anak (hak sipil & kebebasan; lingkungan keluarga & pengasuhan; kesehatan & kesejahteraan; pendidikan & pemanfaatan waktu luang; perlindungan khusus) yang diukur melalui 31 indikator berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), dengan tujuan mewujudkan system pembangunan berbasis hak anak melalui kebijakan, program, dan			<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Dasar 1945 pasal 28b - Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

				kegiatan terukur yang melibatkan semua pihak untuk memastikan tumbuh kembang optimal dan perlindungan anak			- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)
45.	Rencana Aksi Pengarusutamaan Tahun 2024-2026	Daerah Gender	DP3AP2KB	Memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan PUG, sebagai acuan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah /unit kerja, sebagai acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan PUG dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi		√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)

46.	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2027	BKAD	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo TA 2027	√		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
47.	Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD	BKAD	Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
48.	Perubahan atas Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran APBD Tahun 2026	BKAD	Perubahan atas rincian pada peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2026		√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
49.	Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	BKAD	Tata cara pemberian dan besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas	√		Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari

						Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, dan Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025
50.	Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2026	BKAD	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo TA 2026	√		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
51.	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Perencanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
52.	Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	BKAD	Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan anggaran	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
53.	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang	BKAD	Mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	√		BAB II huruf D angka 2 huruf e angka 9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

	Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo					tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
54.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025	BKAD	Ringkasan laporan realisasi anggaran TA 2025	√		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
55.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karo	BKAD	Kebijakan Akuntansi Konsesi Jasa, Pengaturan Bersama dan Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran		√	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan Dari Transaksi Nonpertukaran, Peraturan Menteri

					Keuangan Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 19 Pengaturan Bersama
56.	Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2026	BKAD	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	√	Peraturan Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
57.	Harga Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2026	BKAD	Kebijakan Akuntansi Konsesi Jasa, Pengaturan Bersama dan Pendapatan dari Transaksi Nopertukaran	√	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa, Peraturan Menteri Keuangan Republik

					Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan Dari Transaksi Nonpertukaran, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 19 Pengaturan Bersama
58.	Analisis Standar Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karo	BKAD	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	√	Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

59.	Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karo TA 2026	BKAD	Ringkasan laporan realisasi anggaran TA 2025	√	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
60.	Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2026	BKAD	Kebijakan Akuntansi Konsesi Jasa, Pengaturan Bersama dan Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran	√	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 18 Pendapatan Dari Transaksi Nonpertukaran, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024

						tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 19 Pengaturan Bersama
61.	Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2026	BKAD	Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2026	√		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional
62.	Harga Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2026	BKAD	Harga Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2026	√		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
63.	Analisis Standar Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karo	BKAD	Analisis Standar Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karo	√		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
64.	Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karo TA 2026	BKAD	Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karo TA 2026	√		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

65.	Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2027	BKAD	Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2027	√	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional
66.	Harga Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2027	BKAD	Harga Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2027	√	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
67.	Analisis Standar Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karo TA. 2027	BKAD	Analisis Standar Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karo TA. 2027	√	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
68.	Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karo TA 2027	BKAD	Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karo TA 2027	√	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
69.	Penyelenggaraan Pemerintah Digital di Kabupaten Karo	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Tata Kelola Pemerintah Digital 2. Manajemen Layanan Digital Pemerintah 3. Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital	√	1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

			<ul style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital 5. Keamanan Pemerintah Digital 6. Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data 7. Kapabilitas Penanganan Insiden Siber 8. Aplikasi Pemerintah Digital 9. Infrastruktur Pemerintah Digital 10. Integrasi Aplikasi 11. Portal Layanan Digital Pemerintah 12. Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah 13. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah 			<ul style="list-style-type: none"> Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182) 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19) 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 03)
70.	Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Kelembagaan Pengelolaan Pengaduan	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023

			<ul style="list-style-type: none"> 2. Cara Penyampaian Pengaduan, Jenis, dan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan 3. Pemantauan dan Evaluasi 4. Pelaporan 5. Pembinaan dan Pengawasan 6. Pendanaan 			tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
71.	Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo	Bagian Umum dan Bagian Perencanaan Keuangan Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas 	√		Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

			<p>yang dipakai atau digunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</p> <p>e. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;</p> <p>f. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</p> <p>g. Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;</p> <p>h. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

72.	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Berastagi	PUTR	Tujuan; Rencana Struktur Ruang; Rencana Pola Ruang; Ketentuan Pemanfaatan Ruang; Peraturan Zonasi; dan Kelembagaan	√		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang - Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2042
73.	Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo	Dinas Kesehatan	Tarif Layanan Puskesmas	√		<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 1 Tahun 2022 - Permendagri Nomor 79 Tahun 2016 - Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 - Permenkes Nomor 59 Tahun 2014
74.	Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo	Dinas Kesehatan	Penggunaan SILPA Puskesmas	√		<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

						Keuangan Badan Layanan Umum (sebagaimana diubah dengan PP 74/2012): Dasar fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD
75.	Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo	Dinas Kesehatan	Pemanfaatan Pendapatan	√		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (diubah dengan PP 74 Tahun 2012) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum - PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 205-211) - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

76.	Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo	Dinas Kesehatan	Pengadaan Barang dan Jasa	√	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 (dan perubahan terbaru/Perpres 46/2025)
77.	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo	Dinas Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan BLUD Puskesmas	√	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang telah diubah dengan PP Nomor

						74 Tahun 2012, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024
78.	Pedoman Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pedoman Evaluasi Kinerja BLUD	√		- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
79.	Pedoman Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan	Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai Non ASN	√		- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Permendagri No. 79 Tahun 2018
80.	Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan	Remunerasi	√		- UU Nomor 1 Tahun 2004, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah (PP)
81.	Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan	Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Lain	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
82.	Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah pada	Dinas Kesehatan	Pola Tata Kelola BLUD	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

	Dinas Kesehatan Kabupaten Karo					
83.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo	Dinas Kesehatan	Renstra BLUD	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
84.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo	Dinas Kesehatan	SPM BLUD	√		Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024, Peraturan Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal


 BUPATI KARO,

 ANTONIUS GINTING